

ABSTRAK
DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN
SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH OLEH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL

Oleh
Marlince Yunita Penu Weo
22310071

Studi Kasus Hukum ini membahas mengenai penyelesaian sengketa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sengketa bermula ketika penggugat merasa dirugikan karena sebagian bidang tanah yang telah dikuasainya berdasarkan alas hak yang sah justru diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama pihak lain oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Atas dasar tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam putusannya, hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa penerbitan sertifikat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). Selanjutnya, tergugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan pada tingkat kasasi hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan tanah yang menjadi kewenangan peradilan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam mengabulkan gugatan penggugat, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang didukung oleh studi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pertimbangan hukum antar tingkat peradilan disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah, sehingga menimbulkan ketidakseragaman putusan dalam penyelesaian sengketa pertanahan.

Kata Kunci: *sengketa pertanahan, Sertifikat Hak Milik, Badan Pertanahan Nasional, PTUN, kasasi.*

ABSTRACT
**Description of the Settlement of Disputes Regarding the Issuance of Land
Ownership Certificates by the National Land Agency**

By
Marlince Yunita Penu Weo
22310071

This legal case study discusses the resolution of disputes concerning the issuance of Certificates of Ownership over land by the National Land Agency (BPN). The dispute arose when the plaintiff suffered losses because part of the land he had controlled based on valid legal evidence was issued a Certificate of Ownership in the name of another party by the Head of the Kampar Regency Land Office. On that basis, the plaintiff filed a lawsuit with the State Administrative Court (PTUN). In its decision, the PTUN granted the plaintiff's claim by declaring that the issuance of the certificate constituted a State Administrative Decision that was concrete, individual, and final, and contrary to the principles of good governance. This decision was subsequently upheld by the State Administrative High Court (PT.TUN). Furthermore, the defendant submitted a cassation appeal to the Supreme Court, and at the cassation level the judges declared the plaintiff's claim inadmissible on the grounds that the dispute constituted a land ownership dispute falling under the jurisdiction of the general courts. This research aims to analyze the legal reasoning of the judges of the State Administrative Court and the State Administrative High Court in granting the plaintiff's claim, as well as to examine the legal considerations of the Supreme Court judges who declared the claim inadmissible. The research method used is normative legal research with a descriptive qualitative approach, supported by the study of statutory regulations and court decisions. The results of the research indicate that differences in legal reasoning among judicial levels are caused by differing interpretations regarding the absolute competence of the State Administrative Court in adjudicating disputes related to the issuance of Certificates of Ownership over land, resulting in inconsistencies in the resolution of land disputes.

Keywords: *land dispute, Certificate of Ownership, National Land Agency, State Administrative Court, cassation.*